

BAB II

SITUASI POLITIK PRA PEMILIHAN UMUM

A. Kelompok Kekuatan Politik

Sebagai kelanjutan dari Proklamasi 17 Agustus 1945, bagi bangsa Indonesia adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI dari segala percobaan dan halangan yang ingin menghancurkan RI, yaitu antara lain; datangnya kembali bangsa Belanda (NICA) ke Indonesia dengan membonceng sekutu.

Pada masa ini bangsa Indonesia lebih dikenal dengan nama Revolusi fisi, karena banyak terjadi peristiwa baik yang berupa peperangan fisik maupun perjuangan Diplomasi, hal ini berlangsung sampai pada masa pengakuan bangsa Indonesia oleh Belanda secara sah yaitu pada tahun 1949. Pada masa ini di rasakan oleh kaum muslimin sebagai perjuangan untuk agama dan negerinya itu.¹¹

Setelah suasana itu, bangsa Indonesia yang merupakan Republik muda ini timbul partai-partai politik, dimana dalam suatu negara yang berdasar Demokrasi maka rakyat berhak mengeluarkan pendapatnya, menyatakan keinginan dan cita-cita tentang kenegaraan yang kemudian disalurkan lewat partai-partai tersebut.

11

B.J.Boland, Pergumulan Islam, Grafiti Press, Jakarta, Hal.43.

Berdasarkan maklumat yang dikeluarkan pemerintah Republik pada tanggal 3 November 1945, maka di Indonesia timbullah partai-partai politik melaksana jamur di waktu musim hujan.¹² Mulai saat itulah di Indonesia timbul banyak partai politik yang menjadi penyalur bagi fikiran-fikiran yang timbul dalam masyarakat dengan cara-cara yang teratur, sebab dari masing-masing partai politik menganut aliran tertentu dan kadang-kadang terdapat perbedaan.

Dari situlah rakyat dapat menyalurkan pendapatnya, bahkan dapat ikut serta dalam pemerintahan negara, apabila dari suatu partai tersebut mendapat kepercayaan rakyat untuk memegang pemerintahan. Pada masa itu terdapat multi partai antara lain; PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katholik , Persatuan Pegawai Polisi RI, Murba Pembela Proklamasi, Partai Buruh, Partai Rakyat Indonesia, Partai Republik Rakyat Indonesia Merdeka, Akut, Acoma, Partai Politik Demokrasi Islam, Partai Rakyat Desa, R.Sudjono Prawirosudarso, PIR-Wongso, PIR(Persatuan Indonesia Raya)-Hazairin, Partai Politik Permai, Baperki , Girinda, Persatuan Daya, serta partai perseorangan lainnya.

12

CST.Kansil SH, Parpol dan Golkar, Penerbit Aksara Baru, Hal.27.

Dan dari sekian banyak partai yang ada, partai partai tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok partai besar, antara lain partai Masyumi yang lahir 7 November 1945, yang merupakan wadah cara hidup keagamaan dalam hal ini Islam, setelah itu menyusul pula berdirinya partai Komunis Indonesia yang lahir tanggal 17 Desember 1945, yang merupakan kristalisasi dari falsafah hidup Marxisme dan selanjutnya berdiri pula partai Nasionalis Indonesia (PNI) tanggal 20 Januari 1946 di Kediri, yang merupakan wadah dari faham Nasionalisme.¹³

Dari ketiga faham di atas akan diuraikan dari partai-partai Besar yang ada pada saat Pemilihan Umum pertama tahun 1955, diantara partai-partai besar yang ada pada saat itu, yaitu;

I. Masyumi

Sebagaimana di sebutkan di atas, Masyumi berdiri tanggal 17 November 1945 lain dengan Masyumi yang berdiri pada masa Jepang, Masyumi yang berdiri pada saat ini merupakan keputusan Kongres Mukhtar Islam di Yogyakarta, yang di hadiri hampir semua tokoh berbagai Organisasi Islam dari masa sebelum perang serta masa pendudukan Jepang, dengan berdirinya Majelis Syura mereka

memutuskan bahwa partai politik Masyumi di anggap satu-satunya partai politik bagi Umat Islam di Indonesia.¹⁴

Dari keputusan yang disetujui pada tahun 1945 di Yogyakarta itu; maka satu-satunya wadah Organisasi Islam di Indonesia yang diakui semenjak berdirinya hingga sampai bubarnya (1960) yang mencakup berbagai organisasi yang ada di Indonesia, baik yang berdiri sebelum masa penjajahan maupun organisasi yang berdiri pada masa kemerdekaan yang baru diproklamasikan.

Dalam tubuh Masyumi pada saat itu terdiri dari dua macam anggota, yang meliputi perorangan dan organisasi, yang dibatasi umur 18 tahun atau sudah pernah kawin, diantara organisasi yang ada dalam Masyumi mula-mula empat organisasi; Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama', Perikatan Umat Islam, dan Pertasuan Umat Islam. Yang mana Muhammadiyah merupakan organisasi pembaharu dan Nahdlatul Ulama' Tradisional, dan lainnya cenderung bersikap modern dalam soal dunia dan tradisional dalam soal agama, dari situ memudahkan kedua organisasi bekerja sama dalam kalangan modernis yang akhirnya pada tahun 1951 kedua partai ini menjadi

14

Dilear Noer, Partai-Partai Islam di Pentas Nasional, Grafiti Press, Jakarta, 1987, Hal.47.

pemersatu Umat Islam Indonesia.¹⁵

Seperti halnya yang diuraikan di atas bahwa Masyumi yang berdiri pada saat ini bukan seperti Masyumi pada masa Jepang yang banyak pendukungnya dan kalau di lihat dari sosiologi Umat yang ada maka pendukung dari partai baru ini, adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'.¹⁶ Dari keanggotaan yang telah menjadi pendukung utama maka dapat di katakan bahwa partai yang baru ini merupakan kelanjutan dari MIAI, akan tetapi kali ini hanya mengkhususkan perjuangannya di bidang Politik dalam rangkai menegakkan ajaran Islam dalam wadah Indonesia yang merdeka.

Pada uraian di atas telah diuraikan tentang lahirnya Masyumi, dengan adanya kongres Muktamar Yogyakarta. Tercatat sebagai ketua penyelenggara Kongres Muktamar tersebut yaitu Moh. Natsir, dengan anggota-anggotanya, seperti; Soekiman Wiryo-sendjojo, Abikusno Tjokroyoso, A. Wahid Hasyim, Wali Al-Fatah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paku Alam VIII, dan A. Ghaffar Ismail. Di mana dalam kongres Muktamar itu telah menghasilkan keputusan bahwa :

¹⁵

Dilear Noer, Ibid, Hal.49.

¹⁶

Drs. A. Syafi'i Ma'arif, Islam dan Politik di Indonesia, IAIN Sunan Kali Jaga Press, Yogyakarta, Hal.30.

1. Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia.
2. Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib (politik) Umat Islam Indonesia.

Dimana Masyumi pada periode awal ini terdiri dari Majelis Syura yang di ketuai oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan pengurus besar (badab eksekutif) yang di ketuai oleh Soekiman Wiryo sendjojo, dan Moh. Natsir sendiri, pada periode awal ini sebagai anggota pengurus besar.¹⁷

Kalau di lihat dari hasil kongres Muktamar yang salah satunya menyebutkan bahwa tujuan berdirinya Masyumi memperjuangkan nasib politik Umat Islam Indonesia, maka dari hal ini jelaslah bahwa pembentukan Masyumi pada waktu itu di bentuk dalam rangka menyalurkan Aspirasi politik Umat Islam sebagai serminan dari potensi mereka yang besar dan kongkrit. Dan dari keputusan yang ada itu, maka Umat Islam Indonesia tidak memiliki partai politik yang lain selain Masyumi.

II. Partai Komunis Indonesia

Sebagaimana yang telah di singgung di atas yang tergolong juga sebagai tiga partai besar yaitu Partai Komunis Indonesia, dimana partai ini merupakan kristalisasi dari faham hidup Marxis.

kabinet kembali Demisioner dan Indonesia mengalami krisis pemerintahan.²⁶

Setelah mengalami krisis yang agak lama (58 hari) akhirnya kabinet baru terbentuk, dengan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai perdana Menterinya. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir sebelum Pemilihan Umum I dan terkenal dengan nama kabinet Ali I atau kabinet Ali-Wongso, kabinet ini di resmikan pada tanggal 31 Juli 1953 dalam kabinet ini Masyumi sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, dan sebagai gantinya Nahdlatul Ulama' (NU) sebagai kekuatan politik baru. Sebagaimana tabel di bawah ini adalah partai yang duduk dalam kabinet Ali I :

Kabinet Ali I

Perdana Menteri	Mr. Ali Sastroamidjojo	PNI
Wakil Perdana Menteri I	Mr. Wongsonegoro	PIR
Wakil Perdana Menteri II	Zainul Arifin	NU
Menteri Luar Negeri	Mr. Sunario	PNI
Menteri Dalam Negeri	Mr. Dr. Hazairin	PIR
Menteri Pertahanan	Mr. Iwan Kusuma Sumantri	Progresif
Menteri Kehakiman	Mr. Djody Gondokusumo	PRN
Menteri Penerangan	Dr. L.F. Tobing	SKI
Menteri Keuangan	Dr. Ong Eng Die	PNI
Menteri pertanian	Sudjarwo	BTI
Menteri Perekonomian	Mr. Iskaq Tjokrodisurya	PNI
Menteri Perhubungan	Abikusno Tjokrosujoso	PSII
Menteri Pekerjaan umum	Ir. Rooseno	PIR
Menteri Perburuhan	S.M. Abidin	Buruh
Menteri Sosial	R.P. Suroso	Parindra
Menteri Pendidikan, pengajaran, kebudayaan	Mr. Moh Yamin	-
Menteri Agama	K.H. Masjkur	NU

²⁶ Nugraha Noto Susanto, Op Cit, Hal. 90.

Menteri Kesehatan	Dr.L.P.Tobing(ad Intern)	SKI
Menteri Negara dengan tanggung jawab soal Agraria	Moh Hanafiah	NU
Menteri Negara Dengan tanggung jawab kesehjateraan Negara	Sudibjo	PSII ²⁷

Walaupun kabinet Ali-Wongso dapat di katakan sebagai kabinet yang paling lama dalam bertahan, akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955 Ali sastroamidjojo mengembalikan mandatnya sebab yang utama yaitu kelanjutan dari peristiwa 17 oktober. Di samping itu juga karena keadaan perekonomian yang semakin buruk dan korupsi yang meningkat yang menyebabkan kepercayaan rakyat merosot.

Di lihat dari beberapa data di atas, maka tampak bagaimana hubungan yang ada antara partai-partai politik seperti : Masyumi, PNI, dan PKI dalam kursi pemerintahan, yang mengakibatkan pergantian kabinet berkali-kali dan sampai ada dalam setahun terjadi pergantian kabinet 2 kali. dari sinilah akan diuraikan hubungan yang di jalankan diantara partai-partai tersebut, sehingga mengakibatkan sampai berlalutnya Pemilihan Umum Pertama di Indonesia yang selama ini tertunda-tunda pelaksanaannya.

27

Dilear Noer, Op Cit, Hal.240.

24

Kalau dilihat dari partai yang ada pada masa itu, maka dari masing-masing partai terutama PNI dan Masyumi yang merasa dirinya menjadi partai besar berusaha untuk menjadi formatir kabinet. Dengan demikian akan menduduki jabatan perdana menteri, dengan begitu maka partai yang bersangkutan dapat menghentikan program kabinet yang dijadikan landasan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang di hadapi menurut anggapan dan penilaian yang benar dan tepat.

Dalam kenyataannya dalam Dewan Perwakilan Rakyat tidak ada satu partaipun yang mempunyai kekuatan suara mutlak. Maka dalam pembentukan kabinet tidak bisa tidak, kabinet yang di bentuk haruslah bersifat Koalisi yakni kabinet yang terdiri dari partai-partai yang suaranya dalam parlemen dapat diandalkan dukungannya.²⁸

Memang dari partai yang ada, pada masa tahun 1950 adalah Masyumi dan PNI. Dimana kedua partai ini yang banyak berkecimpung dalam pemerintahan di banding dengan partai Komunis, yang pada saat itu tidak begitu muncul dalam pemerintahan.

28

I.N. Soebagijo , K.H. Masjkur Sebuah Biografi, Penerbit. Gunung Agung, Jakarta, MCMLXXXII, Hal. 162.

Kedua partai tersebut (PNI dan Masyumi) pada tahun 1950-1955 mempunyai sikap yang berbeda. Pada saat Revolusi kedua partai ini lebih mencerminkan kerja sama antara mereka, baru setelah penyerahan kedaulatan itulah hubungan kerja sama itu mulai merenggang. Pada umumnya mereka lebih berusaha untuk mendapatkan tempat dengan memberi dukungan kepada formatir agar dapat masuk kabinet.

Partai-partai Masyumi dan PNI sendiri tidak satu kata. Terbukti saat kabinet Hatta terpilih, saat itu Masyumi hanya menerima 4 kursi, sedang PNI 3 kursi, padahal partai Masyumi pada mulanya telah membina organisasi kedalam, setelah penyerahan dan bukan untuk mempersebutkan kedudukan dalam pemerintahan. Hal itupun telah di sadari dengan tidak terbinanya tubuh kepemimpinan dalam tubuh Masyumi secara organisatoris.²⁹

Dari kedudukan yang ada, maka Masyumi sejak awal kabinet parlementer telah menduduki posisi yang boleh di katakan baik antara lain; Menteri keuangan, Menteri Pendidikan, Menteri Pengajaran, Menteri Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Negara.³⁰

29

Dilear Noer, Op Cit, Hal.200.

30

Ibid, Hal.202.

Melihat pengalaman yang ada pada masa kabinet Hatta, maka bangsa Indonesia yang semula berbentuk RIS akhirnya berubah menjadi bentuk RI resminya 19 Mei 1950. Dari masa kabinet Hatta itulah terdorong untuk membentuk kabinet koalisi dalam masa kabinet parlementer.

Kabinet ini hanya terbentuk dengan sistim koalisi partai yang hal ini di tentukan oleh UUD 1950. Terutama karena komposisi parlemen tidak memungkinkan pembentukan kabinet dengan satu, dua partai saja, dalam rangka ini pola yang idial ialah bila Masyumi dan PNI bersama-sama duduk dalam kabinet, sehingga mendorong partai-partai lain berada dalam posisi tambahan.³¹

Dari kenyataan yang ada itu, maka setelah kabinet Hatta jatuh, Masyumi duduk dalam posisi penting . Begitu pula halnya dalam kabinet Natsir yang memerintah pada tanggal 6 September 1950, Masyumi mendapat kedudukan penting , walaupun PNI sebagai partai kedua terbesar akan tetapi tidak turut dalam kabinet, salah satu sebab PNI menolak turut dalam kabinet ialah karena mereka tidak diberi kedudukan yang sesuai dan inti kabinet ini adalah Masyumi.³²

³¹
Ibid, Hal.203.

³²
Nugraha Noto Susanto, Op Cit, Hal.81.

partai-partai lain termasuk satu partai untuk Irian Barat.

Dalam pembicaraan dengan formatir, PNI bersedia melepaskan kursi Luar Negeri kepada Masyumi, dan Menteri Pendidikan kepada yang lain. Tetapi PNI tetap menuntut kursi Menteri Dalam Negeri, karena PNI meraakan ketidakadilan bila Masyumi menduduki kursi Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri yang akhirnya mengakibatkan ketidakediaan formatir Natsir dalam memenuhi keinginan PNI.

Akhirnya kursi yang di perebutkan PNI dan Masyumi itupun terbentuk, dengan Masyumi tetap sebagai partai yang dominan. Masyumi menduduki 4 kursi, yang ada dalam posisi Perdana Menteri, Menteri Luar Negara, Menteri Keuangan dan Menteri Agama, sedang yang lain di duduki 2 PSI, 2 PIR, 2 Kristen (katholik dan Protestan), 1 PSII, 1 Demokrat, dan 4-tanpa partai.

Kabinet ini dalam hitungan memperoleh dukungan, 50 anggota Masyumi, 18 PIR, 16 PSI, 11 Demokrat, 9 Parindra, 8 Katholik, 6 PNI Merdeka, 5 PSII dan 4 Parkindo yang ada dalam parlemen³⁴ Pada kabinet ini PNI menjadi partai oposisi, meliputi 41 PKI dan kawan-kawannya (29), BTI (5) dan partai burh yang bersifat netral.

Kiranya partai Masyumi yang saat itu mulai di atas angin, kini mulai surut kembali. Dalam kepemimpinan ini kelemahannya terletak pada ketidak berhasilan Masyumi menarik PNI ikut dalam kabinet, yang mereka harapkan adalah kabinet koalisi yang melambungkan Nasionalisme dengan banyak partai yang duduk dalam kabinet. Tetapi dalam kenyataan yang ada Masyumi tidak sanggup memegang tapak kepemimpinan yang di embannya, sehingga dalam golongan Masyumi sendiri juga mengalami Pro dan Kontra.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam suatu perang pernyataan yang timbul antara kalangan Masyumi sendiri, yang di mulai oleh Yusuf Wibisono pejabat ketua partai dalam suatu wawancara dengan Kantor Berita Antara yang mengatakan bahwa pengembalian mandat oleh Natsir kepada presiden merupakan jalan yang terbaik untuk memperbaiki keadaan pemerintahan yang berbicara untuk kepentingan Negara dan Masyumi.

Yusuf mengemukakan dua alasan mengapa Natsir harus mengembalikan mandatnya : pertama; karena mosi Hadi kusumo. Kedua karena kegagalan Konferensi tentang Irian Barat. Di samping itu Ia berpendapat orang-orang yang tidak berpartai seharusnya tidak masuk kabinet, mereka dapat pergi main bola atau piknik tanpa diawasi siapapun, Ia menambahkan bahwa tidak seorangpun yang bertanggung jawab.³⁵

³⁵ Ibid , Hal.213.

Dari berbagai alasan yang ada sebagai penyelesaian dari tubuh Masyumi. Dengan tidak ikut sertanya PNI dalam kabinet, yang menyebabkan ketidak mampuan Masyumi duduk dalam pemerintahan karena kurang dukungannya dari partai terbesar yaitu PNI itu sendiri, akhirnya pada saat itu Natsir menyerahkan mandatnya kepada presiden hal ini terjadi tanggal 21 Maret 1951.

Kegagalan yang telah dialami oleh partai Masyumi ini menjadikan partai ini terbiasa dengan sistim parlementer. Oleh karena itu pembentukan kabinet di serahkan kepada yang menjadi oposisinya yaitu Partai Nasionalis Indonesia.

Dan presiden juga berfikir sejalan dengan ini akhirnya PNI juga berusaha untuk membentuk sistim pemerintahan seperti apa yang diusahakan oleh Partai Masyumi dengan bentuk koalisi antara Partai Nasionalis Indonesia dan Masyumi. Walaupun kedua partai ini pada dasarnya tidak akan pernah menemukan kecocokan semenjak penyerahan Belanda ke Indonesia, akan tetapi pembentukan kabinet tidak semudah sebagaimana yang di ucapkan oleh PNI di saat awal 1950.

Terbukti dengan pengembalian mandat Mr. Sartono tanggal 18 April 1951 kepada presiden.³⁶

36

Nugraha Noto Susanto, Op Cit , Hal.85.

Dan kursi kepemimpinan beralih lagi ketangan Masyumi, pada masa ini antara PNI dan Masyumi . masing-masing memperoleh 5 kursi, PIR 3, Parkindo , Demokrat, Katholik, masing-masing 1, ada 3 Menteri tanpa partai, PSII dan PERTI pada masa itu tidak duduk di dalamnya.

Dari kenyataan yang ada, duduk dalam kabinet masih tetap dari Masyumi. Secara langsung maupun tidak program yang ada merupakan kelanjutan dari kabinet sebelumnya. Susunan kabinet masa itu sudah bisa dikatakan sebagai kabinet koalisi, partai-partai yang duduk di dalamnya menjadi partai besar Indonesia yang mayoritas anggotanya di pegang oleh Masyumi dan PNI.

Kiranya persaingan dan perpecahan antara partai-partai yang ada selama menghadapi Pemilihan Umum ini kian memuncak dan semakin parah, baik dari partai Islam sendiri maupun dari partai yang berdiri sendiri dan ikut dalam kampanye pada saat menghadapi Pemilihan Umum ini.

Sebagaimana di jelaskan di atas, bahwa antara partai yang ada terutama PNI dan Masyumi yang saling berebut mencari pengikut, jabatan dan kedudukan pemerintahan yang menimbulkan pertarungan antar partai yang mencapai puncaknya pada tahun 1952.

Perebutan kekuasaan pada saat itu semakin

Di samping ketegangan antar partai , ketegangan juga bertambah antara partai oposisi dan pre - siden. Yang menuduh beberapa pemimpin bangsa Indonesia sendiri bekerja sama dengan bangsa Asing dalam rangkai saling menghancurkan , dengan cara menyuap negar dengan uang berjuta-juta yang bertujuan untuk menjatuhkan .

Hal ini di kamukakan karena terlihat jelas adanya Masyumi tidak mendapat kursi sama sekali , kursi kabinet di duduki 4 dari PNI, 3 dari NU dan partai lainnya, oleh karena itu Masyumi yang menjadi partai oposisi tetapi tidak sampai menjatuhkan kepemimpinan yang ada dan kalau di lihat pada dasarnya ini di sebabkan adanya NU yang keluar dari tubuh Masyumi, sehingga partai yang lain menggunakan kesempatan yang ada untuk mengadu domba partai NU dan Masyumi.

Dari pengalaman yang berjalan bertahun-tahun dengan berbagai corak dan sistim yang bermacam-macam juga terlahir dari berbagai golongan partai, maka salah satu program kabinet yang berupa Pemilihan Umum semakin dekat hal inilah yang menuntut dari semua partai untuk mewujudkan yang selama ini menyebabkan ketegangan di antara bangsa Indonesia sendiri.

